

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS EKSTASI PIL DOBEL L DI POLRES BATU

Yunata Nanda Trisula¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : yunata.trisula@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the form of law enforcement for the criminal act of abusing the double L pill ecstasy at the Batu Police. So it is necessary to have a discussion in the form of Modus operandi about the crime of abuse of ecstasy double L pills, law enforcement of criminal acts of abuse of double L ecstasy drugs, obstacles in law enforcement of criminal acts of abuse of double L pills of ecstasy drugs, because the perpetrators of abuse of hard drugs It is very disturbing. If it is not handled seriously, it can have a negative impact on the surrounding community. By using empirical juridical approach research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail the Modus operandi of the crime of drug abuse. double L pill ecstasy, law enforcement of the criminal act of abuse of the double L pill ecstasy, obstacles in law enforcement of the criminal act of abuse of double pill ecstasy

Keywords: Law Enforcement, Crime, Hard Drugs Double L Pills

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di Polres Batu. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk Modus operandi tentang tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L, penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L, kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L, karena pelaku penyalahgunaan obat keras sudah sangat meresahkan. Jika tidak ditangani secara serius, dapat memberikan dampak negative untuk masyarakat sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai Modus operandi tentang tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L, penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L, kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Obat Keras Pil Dobel L

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala ketentuannya dilandaskan oleh hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum yang segala konsepnya disesuaikan dengan Pancasila, dimana segala ketentuan dan peraturannya harus berdasarkan dengan nilai – nilai dan norma – norma yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pelaksanaannya segala peraturan mengenai hukum dituangkan dalam nilai dan norma yang diciptakan untuk senantiasa di taati dan di patuhi agar terciptanya rasa ketertiban, keadilan, keamanan, dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya.²

Pelanggaran hukum yang seharusnya tidak terjadi karena mengacu terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan. Namun pada pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini perlu di atasi dengan masyarakat perlu menyadari bahwa ada aturan – aturan yang telah di tetapkan dengan tujuan baik untuk masyarakat sendiri dan terhindar dari pelanggaran pidana. Namun, tidak hanya masyarakat saja, ada peran yang sangat penting oleh penegak hukum dalam setiap penyelesaian pelanggaran hukum untuk selalu melakukan haknya menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah penegakan hukum yang mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep – konsep menjadi kenyataan.³ Hal ini dapat tercipta dan dapat diwujudkan dengan kerjasama antar para aparat penegak hukum karena aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Namun pada pelaksanaannya tidak sedikit perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud dan tujuan tertentu dengan tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia cenderung sangat unik sebagai mana dilihat dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh penegak hukum, dimana diantaranya adalah kasus illegal logging, kasus kejahatan korupsi, dan kasus penyalahgunaan narkoba. Dimana penegakan hukum dari beberapa kasus diatas terjadi penyimpangan (*Derivation*) dari aturan – aturan pidana yang telah ditetapkan, sehingga dimana seharusnya orang yang tidak bersalah bisa ditetapkan menjadi terangka, sedangkan orang yang telah jelas bersalah dan

² Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, Hlmn 2

³ Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

melakukan tindak pidana tersebut bebas dari jerat hukum.⁴ Terjadinya kejahatan atau terwujudnya perilaku deviatif di tengah masyarakat bukan disebabkan faktor hereditas atau keturunan, tetapi dipengaruhi oleh kepandaian seseorang atau sekelompok orang untuk menyikapi kejadian, keadaan, dan perilaku masyarakat, atau aspek lainnya sebagai obyek yang dipelajarinya.⁵

Seiring meningkatnya kemajuan teknologi dan kebudayaan di dalam masyarakat di zaman ini. Seiring dengan hal tersebut, timbul pula beberapa tindak pidana dibidang penyalagunaan obat – obatan, dimana hal ini lebih sering di sebut oleh masyarakat adalah sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya). Hal ini tentu menjadi permasalahan utama yang menjadi musuh bagi suatu bangsa di dunia ini. Penyalahgunaan obat dilakukan cenderung dengan tujuan non medis, yang biasanya digunakan untuk mengubah kesadaran. Sedangkan jika penggunaan obat – obat secara salah yang artinya kesalahan dosis, kesalahan indikasi dan kesalahan penggunaan yang terlalu lama, sehingga dapat menyebabkan efek samping yang di inginkan dan bahkan efek samping yang tidak diinginkan sekalipun.⁶

Penjaminan ketersediaan obat – obatan di setiap daerah untuk kebutuhan kesehatan haruslah dibarengi dengan ketentuan dalam peredarannya serta sanksi – sanksi yang kuat agar membatasi dan mengawasi terhadap peredaran obat – obatan tersebut. Hal ini dimaksudkan karena maraknya penyalahgunaan obat – obatan yang terjadi di Indonesia digunakan untuk kepentingan lain yang menyerupai narkotika. Maraknya penyalahgunaan obat – obatan di Indonesia membuktikan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, begitu pula lemahnya peraturan yang mengatur tentang farmasinya serta kurangnya ketelitian para apoteker yang menyebabkan gampangya orang menyalahgunakan obat – obatan yang sebenarnya hal ini dapat membahayakann diri mereka sendiri.⁷

Salah satu obat berbahaya yang saat ini banyak digemari dan tergolong dalam obat keras atau bat berbahaya adalah pil dobel L. Pada dasarnya pil dobel L ini adalah obat – obatan yang sangat bermanfaat dan digunakan didalam ilmu pengetahuan dan di bidang kesehatan. Sifat obat ini mengurangi efek penyakit Parkinson dan juga dapat memberikan efek doping

⁴ Ediwarman, (2014), *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

⁵ Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, “The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College”, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, akses tanggal 16 Juni 2021

⁶ Ridwan M. Thaha, 2016, *Penyalahgunaan Obat keras Oleh Buruh Bangunan di Kota Makasar*, jurnal vol-2FKKM, hlm 3

⁷ Ibid hlmn 4

sebagai penambah stamina. Namun, jika obat ini digunakan diluar petunjuk dan pengawasan dokter, obat ini akan berdampak negative dan merugikan bagi penggunanya. Dampak negative dari pil dobel L ini yaitu obat ini dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat dan dapat menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang sangat cepat pada aktivitas mental dan perilaku, jika hal ini terjadi maka penggunanya dapat merasakan kenikmatan tersendiri yang dapat menimbulkan dampak lain dalam kehidupan, yaitu tindak kriminalitas lain seperti penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya yang salah pil dobel L dapat menimbulkan ketergantungan, bahkan dapat menyebabkan kematian jika di konsumsi dengan dosis yang tidak sesuai atau berlebihan.⁸

Pemerintah melakukan antisipasi untuk menanggulangi tindak pidana dari penyalahgunaan obat keras jenis pil dobel L ini dengan mengeluarkan peraturan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang – Undang Kesehatan) yang dimaksud untuk mengatur tindak pidana dari penyalahgunaan obat keras yang bersifat kejahatan.

Menyadari bahwa penyalahgunaan obat keras di masyarakat merupakan suatu hal yang sulit dihapuskan, maka yang perlu dilakukan saat ini adalah mengendalikan seminimal mungkin dan menekan angka penyalahgunaan obat keras jenis pil dobel L ini di masyarakat. Sehingga peran aktif dari pihak penegak hukum (Kepolisian) untuk menindak penyalahgunaan obat pil dobel L dan menciptakan kondisi yang aman di masyarakat. Serta perlunya peran aktif para penegak hukum untuk memberantas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat keras agar tidak terjadi lagi hal yang sama atau tindak pidana baru yang dapat meresahkan kehidupan di masyarakat.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L di Polres Batu”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimanakah Modus operandi tentang tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di Polres Batu? , (2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di wilayah Polres Batu?, (3) Apa kendala – kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di Polres Batu?

⁸ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, OBAT-OBATAN PENTING : Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 430

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengkaji dan menganalisis Modus operandi tentang tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di Polres Batu , Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di wilayah Polres Batu, Untuk mengkaji dan menganalisis kendala – kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di Polres Batu.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L di Polres Batu. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyediakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau juga dikenal dengan penelitian non-doktrinal. Jenis penelitian yuridis empiris dalam melihat pelaksanaan dalam hal penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di wilayah Polres Batu. Oleh karenanya pendekatan ini dirasa cukup relevan dalam rangka menemukan kelemahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L di Polres Batu, lalu kemudian menggali dan memecahkan persoalan mengenai upaya dan solusi dari Polres Kota Batu dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L. Dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Modus Operandi Penyalahgunaan Obat Keras Pil Dobel L di Wilayah Polres Batu

Kejahatan narkoba dan obat – obatan terlarang termasuk Pil Dobel L ini merupakan suatu kejahatan yang transnasional yang penyalahgunaannya dilakukan dengan modus operandi yang tinggi. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan pil dobel L di Indonesia cukup tinggi khususnya di wilayah hukum Polres Batu, Jawa Timur.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan farmasi menghasilkan produk yang disebut obat. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Pemerintah menggolongkan obat menjadi beberapa macam, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dari penggunaan obat – obatan oleh masyarakat. Berikut penggolongan dari macam – macam obat menurut Undang – undang.⁹

1. Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu yang berupa hilangnya rasa sakit, halusinasi, rangsangan semangat serta timbulnya hayalan – hayalan. Sifat tersebut ditemukan dan dipergunakan dalam dunia medis untuk kepentingan manusia dalam menghilangkan rasa sakit seseorang dan dalam proses pembedahan.¹⁰ Narkotika digolongkan dalam 3 kelompok :
 - a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan mempunyai bahan adiktif yang paling tinggi yang seringkali digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian.
 - b. Narkotika Golongan II yaitu narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian dan juga memiliki daya adiktif kuat.
 - c. Narkotika Golongan III yaitu narkotika dengan daya adiktif ringan yang dimanfaatkan untuk penelitian dan pengobatan.
2. Psikotropika (obat berbahaya) obat yang mempunyai khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku seseorang. Misalnya, diazepam dan golongan ekstasi.
3. Obat keras (daftar G = geverlujk = berbahaya), yakni semua obat yang mempunyai beberapa ciri – ciri, diantaranya ;
 - a. Memiliki takaran atau dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah

⁹ Hendra Widodo, *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker, cetakan pertama*, D-Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 17-19

¹⁰ Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia : Fakultas Hukum. UNISSULA. Semarang. Hlmn : 204

- b. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis tepinya
 - c. Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan
 - d. Semua sediaan parenteral/injeksi/infus intravena
4. Obat bebas terbatas (daftar W = warschuwing = peringatan), yakni obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat tersebut, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan.
5. Obat bebas, yaitu obat yang diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Obat ini dijual dan dapat dibeli dengan bebas tanpa ada indikasi membahayakan bagi penggunaannya dalam batas dosis yang dianjurkan

Menurut Pasal 9 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan yang mengatur mengenai tata cara mendapatkan izin edar. Adapun bunyi Pasal tersebut, yaitu:

Pasal 9

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pasal 10

- (1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan memperoleh izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Tindak pidana pengedaran obat – obatan terlarang pil dobel L yang sering terjadi di Kota Batu dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus. Diketahui dari beberapa kasus yang telah terungkap bahwa pengedar hanya pengedar saja yang artinya pelaku hanya melakukan praktik penjualan obat terlarang pil dobel L ini tanpa menggunakannya sendiri.

Dari beberapa kasus tersebut diketahui bahwa ada beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku untuk melakukan penjualan obat – obatan terlarang pil dobel L ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Aiptu Budi Santoso pada tanggal 3 Juli 2021, diketahui bahwa modus operandi peredaran pil dobel L di daerah hukum Polres Batu dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dan arus globalisasi saat ini yang dapat memudahkan pengedar menjalankan misinya dan membuat jaringan yang lebih besar dan rumit untuk ditembus oleh aparat kepolisian.¹¹

Faktor ekonomi pun menjadi alasan utama dalam pengedaran pil dobel L ini. Modus yang pelaku lakukan salah satunya adalah pelaku menyimpan pil dobel L ini dengan menyembunyikannya di tempat – tempat yang sekiranya atau anggapan pelaku aparat kepolisian akan sulit menemukannya. Dengan hal ini petugas kepolisian harus benar – benar jeli dalam menemukan obat terlarang pil dobel L ini.

Modus operandi peredaran pil dobel L dimulai pengedar menawarkan pil kepada calon pembeli melalui handphone yang bisa dengan dikirim lewat pesan singkat (sms), pesan whatsapps, atau dengan melalui pesan facebook. Dari hasil pesan (*chatting*) pengedar dan pembeli membuat kesepakatan mengenai harga, waktu, serta tempat transaksi. Transaksi dilakukan di tempat yang disepakati sebelumnya dan pada waktu yang telah disepakati antar pengedar dan calon pembeli. Setelah transaksi dilakukan antar pengedar dan pembeli, maka selanjutnya pembeli menggunakan pil dobel L di lokasi yang dia inginkan seperti bar/club malam atau bahkan digunakan di kediamannya sendiri.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan dampak positif untuk kehidupan. Bahkan segalanya menjadi lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan mencari informasi yang dibutuhkan. Namun, secara tidak langsung perkembangan teknologi informasi ini juga mempunyai dampak yang sangat besar dalam memperluas peredaran pil dobel L yang dapat mempermudah peredaran obat – obatan terlarang seperti pil dobel L beredar dikalangan orang yang tak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan semakin sulitnya membongkar suatu tindak pidana.

¹¹ Wawancara Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Aiptu Budi Santoso pada tanggal 3 Juli 2021

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai nilai Penegakan Hukum Dalam Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L

yang ada di belakang norma tersebut.¹²

Penegakan hukum kasus tindak pidana peredaran obat keras yang ditangani oleh pihak Satresnarkoba Polres Batu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun khususnya kasus peredaran obat keras pil Dobel L yang ditangani oleh Polres Batu. Demi meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat di wilayah hukum Batu pada khususnya polres Batu mengupayakan penegakan hukum terhadap kasus peredaran pil Dobel L.

Peneliti telah melakukan data terbaru di tahun 2021 ini yang pertama sesuai LP - A/13/RES.4.2/2021/NKB/SPKT RES BATU pada tanggal 7 februari 2021 , atas nama MU, Laki-laki, 25 tahun , alamat di desa Giripurno Batu yang bersangkutan telah mengedarkan/menjual Pil dobel L sebanyak 1 tik berisi 8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000 serta mengkosumsinya sendiri.

Yang kedua sesuai LP-A/34/V/RES.4.2/2021/NKB/SPKT RES BATU pada tanggal 1 Mei 2021, atas nama RM, Laki-laki, 26 Tahun , Alamat di Dusun Krajan Pujon yang bersangkutan telah mengedarkan/menjual Pil dobel L sebanyak 352 butir pil dobel L dan shabu serta mengkosumsinya.

Mengenai proses penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus peredaran pil dobel L kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti yang tuturkan oleh penyidik bahwa pedoman dalam penegakan hukum kasus peredaran pil dobel L sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 196 dan pasal 197 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang peredaran sediaan farmasi yang cakupannya mencakup tentang peredaran obat keras.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹² Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012,hlm. 80.

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut

- a. Setiap orang;
 - b. Yang dengan sengaja;
 - c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan; dan
 - d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
2. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
 - b. Yang dengan sengaja.
 - c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
4. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang Disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terpenuhi karena tersangka pengedar pil dobel L yaitu setiap orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap.
- 2) Yang dengan sengaja Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum. Unsur ini terpenuhi karena banyak pengedar pil dobel L melakukan perbuatan dengan sengaja dan penuh kesadaran mengedarkan pil dobel L dengan motif kebutuhan ekonomi guna memperoleh keuntungan.
- 3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- 4) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Aipda Dedik Koko Triyono menjelaskan bahwa seorang pengedar yang tertangkap tangan bertransaksi Pil dobel L tidak serta merta dapat mengeluarkan surat penahanan akan tetapi ada proses lebih lanjut yang harus dijalani. Dalam kasus pil dobel L penyidik tidak bisa langsung mengeluarkan surat penahanan kepada tersangka akan tetapi pihak kepolisian harus melakukan pembuktian awal dalam pemeriksaan guna membuktikan apakah obat tersebut merupakan pil dobel L (trihexyphenidyl). Penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik. Hal ini berbeda dari kasus tindak pidana narkoba yang penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.¹³

¹³ Wawancara dengan Aipda Dedik Koko Triyono Penyidik Satresnarkoba Polres Batu, tanggal 3 Juli 2021

Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L di Polres Batu

Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Batu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras Pil dobel L. Terdapat kendala yang sering ditemui oleh satuan narkoba polres Batu, Kendala tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Penanggulangan tindak pidana peredaran obat keras Pil dobel L oleh sudah dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dituturkan oleh Aipda Dedik Koko Triyono Penyidik Satresnarkoba Polres Batu melalui wawancara yang dilakukan di Polres Batu pada tanggal 3 Juli 2021:

Yang pertama adalah kendala internal, ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya dari aspek penegak hukum sendiri, Kendala internal yang diidentifikasi di Satresnarkoba Polres Batu antara lain: Terbatasnya sumber daya manusia Satresnarkoba Polres Batu menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras pil dobel L, karena semakin meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di Kota Batu, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki Satresnarkoba Polres Batu. Bisa dilihat dari perkembangan angka tindak pidana setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satresnarkoba yang ada di kantor maupun yang terjun di lapangan dalam penangkapan pelaku pengedar. Tidak semua petugas ikut dalam penangkapan, hanya sebagian petugas yang ikut dalam operasi dan sebagian petugas bekerja sesuai dengan tugas masing-masing di kantor.¹⁴

Aipda Dedik Koko Triyono menjelaskan lagi mengenai kendala internal yang kedua mengenai terbatasnya sarana dan prasarana yang merupakan kendala internal yang sering dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Batu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras pil Dobel L. Hal ini disebabkan karena Satresnarkoba Polres Batu terkendala oleh tidak adanya laboratorium untuk pemeriksaan jenis obat di Batu. Apabila Satresnarkoba Polres Batu menangkap tersangka pengedar maka itu menjadi kendala karena untuk pembuktian awal dalam pemeriksaan perlu mengetahui jenis obat itu termasuk pil dobel L atau tidak sedangkan masa penangkapan hanya sebatas 1x24 jam.

Lebih lanjut Aipda Dedik Koko Triyono menjelaskan mengenai kendala eksternal yang sering menjadi kendala dalam penegakan hukum peredaran obat keras pil dobel L di Batu. Menurutnya Kendala Eksternal yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum yang mengatur tentang peredaran pil dobel L yang masih rendah pada masyarakat Batu.

¹⁴ Wawancara dengan Aipda Dedik Koko Triyono Penyidik Satresnarkoba Polres Batu, tanggal 3 Juli 2021

Masyarakat Batu belum begitu memahami bahwa pil dobel L dilarang untuk dikonsumsi tanpa izin dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang. Pemahaman terhadap hukum ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Batu yang masih rendah. Sementara pemahaman hukum pelaku pengedar hanya sebatas pada pemahaman bahwa pil dobel L merupakan obat yang terlarang untuk dikonsumsi dan diedarkan. Tetapi pelaku pengedar masih tetap mengedarkan pil dobel L dengan tujuan memperoleh keuntungan. Satresnarkoba Polres Batu sudah berupaya melakukan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan operasi rutin terkait penyalahgunaan narkoba.

Kendala eksternal berikutnya adalah mengenai luas wilayah Batu yang lumayan luas dan ikon kota Batu yang menjadi Kota Wisata dan Kota Hiburan sehingga mengakibatkan masih banyaknya wisatawan asing ke Kawasan Kota Batu, lalu Lokasi transaksi yang berpindah pindah terkadang menyulitkan petugas yang ada dilapangan. Kurangnya informasi juga menjadi kendala karena untuk mengungkap peredaran obat keras pil dobel L harus memiliki informan yang cukup.¹⁵

Kendala eksternal yang sering terjadi adalah putusnya sistem jaringan yang terputus sehingga belum dapat menyentuh bandar pil dobel L yang menyuplai obat keras pil dobel L. Sehingga Upaya untuk mengungkap jaringan pengedar pil dobel L yang dilakukan oleh satuan resnarkoba polres Batu sejauh ini sudah di jalankan dengan baik dan maksimal. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat kendala dari sisi penangkapan bandar pil dobel L yang menyuplai ketersediaan pil dobel L. Pihak Satuan resnarkoba dalam usaha mengungkap jaringan pengedar pil dobel L melakukan pengembangan kasus yang akan tetapi sering menemui kendala berupa putusnya pengembangan rantai pelaku. Sehingga belum tertangkap bandar yang menyuplai pil dobel L di wilayah Batu.

Berdasarkan penuturan narasumber di atas yaitu Aipda Dedik Koko Triyono yang merupakan Penyidik Satresnarkoba Polres Batu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah personil Satresnarkoba polres Batu;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan kandungan obat;
3. Kurangnya pemahaman larangan mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter dan kurangnya pemahaman mengenai peredaran obat keras tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;

¹⁵ Ibid

4. Batu sebagai Kota Wisata dan Hiburan dan kurangnya informan
5. Terputusnya sistem jaringan pengedar sehingga belum berhasil menangkap bandar obat keras pil dobel L.

Secara teoritis kendala-kendala penegakan hukum pidana setidaknya dipengaruhi oleh lima faktor sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*), yaitu kualitas peraturan hukum yang ada mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum maka peraturan hukum tersebut semakin mudah penegakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang lebih tinggi, dibuat dengan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, serta hukum tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum (*Law enforcement factor*), yaitu faktor Penegak Hukumnya sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum adalah seseorang yang profesional, bermental tangguh, mempunyai etika serta berintegritas tinggi.
3. Faktor Sarana Prasarana (*means factor*), yaitu sarana prasarana sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasara tidak cukup layak maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana dan Prasarana ini mencakup: sarana tempat yang nyaman, sarana alat yang memadai (transportasi, senjata, dll), sarana keuangan yang cukup untuk operasional, dan lain-lain.
4. Faktor masyarakat (*community factor*), yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum terlaksana dengan baik maka masyarakatnya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat tentang hukum tersebut, ketaatan terhadap hukum tersebut, dan penghayaan terhadap fungsi hukum itu sendiri.
5. Faktor budaya (*cultural factor*), yaitu kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan. Faktor budaya biasanya mencakup pada nilai-nilai abstrak yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶ Imron Anwari, Loc. Cit.

Faktor-faktor tersebut yang sering dijumpai dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pada hasil wawancara di atas semua faktor berpengaruh dalam proses penegakan hukum peredaran Pil dobel L. Agar dapat menegakkan hukum secara maksimal maka diperlukan sinergi dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Terkait dengan peredaran obat keras Pil dobel L di Batu, kendala yang dihadapi oleh penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya personil Satresnarkoba polres Batu yang mengakibatkan sulitnya membongkar jaringan peredaran Pil Dobel L.
2. Faktor sarana prasarana, yaitu di Batu tidak terdapat laboratorium untuk pemeriksaan jenis pil, sehingga Satresnarkoba polres Batu, Sehingga jika terjadi penangkapan maka akan menjadi kendala karena untuk pembuktian awal pemeriksaan perlu mengetahui jenis obat sedangkan masa penangkapan pengedar Pil dobel L hanya 1x24 jam.
3. Faktor masyarakat, yaitu keengganan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang mengakibatkan sulitnya aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran Pil Dobel L

KESIMPULAN

1. Modus operandi peredaran pil dobel L yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu yang menjadi alasan itu adalah faktor ekonomi yang pengedarannya dengan modus sebagai berikut :
 - a. Melakukan penawaran dengan calon pembeli menggunakan pesan singkat yang dapat dikirim melalui pesan atau memanfaatkan sosial media seperti (*chatting*) di facebook.
 - b. Setelah mendapatkan kesepakatan antar pengedar dan pembeli, transaksi dilakukan ditempat dan waktu yang telah disetujui keduanya.
 - c. Setelah transaksi dilakukan, pembeli mendapat barang yang di inginkan dan menggunakannya di club malam/bar ataupun dikediamannya sendiri.
 - d. Perkembangan informasi dan komunikasi menyebabkan mudahnya pelaku kejahatan untuk memperluas pengedarannya dan semakin mempersulitnya aparat kepolisian dalam membongkar suatu tindak pidana.
2. Penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus peredaran pil dobel L kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang peredaran sediaan farmasi yang cakupannya mencakup tentang

peredaran obat keras. Dalam kasus ini penyidik tidak bisa langsung mengeluarkan surat penahanan kepada tersangka akan tetapi pihak kepolisian melakukan pembuktian awal dalam pemeriksaan guna membuktikan apakah obat tersebut merupakan pil dobel L (trihexyphenidyl) yang dilakukan paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik.

3. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan obat keras ekstasi pil dobel L di Polres Batu diantaranya sebagai berikut :

a. Kendala Internal (aspek penegak hukum)

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia Satresnarkoba Polres Batu, seperti yang telah diketahui perkembangan angka tindak pidana setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satresnarkoba yang ada di kantor maupun yang terjun di lapangan dalam penangkapan pelaku pengedar.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Batu yang disebabkan karena Satresnarkoba Polres Batu tidak adanya laboratorium untuk pemeriksaan jenis obat di Batu untuk mengetahui jenis obat itu termasuk pil dobel L atau tidak. Sedangkan masa penangkapan pelaku yang hanya sebatas 1x24 jam.

b. Kendala Eksternal

- 1) Kurangnya pemahaman tentang hukum yang mengatur tentang peredaran pil dobel L yang masih rendah pada masyarakat Batu
- 2) Wilayah Batu yang lumayan luas dan ikon kota Batu yang menjadi Kota Wisata dan Kota Hiburan sehingga mengakibatkan masih banyaknya wisatawan asing ke Kawasan Kota Batu yang menyebabkan Lokasi transaksi yang berpindah pindah terkadang menyulitkan petugas yang ada dilapangan.
- 3) Putusnya sistem jaringan pengedaran pil dobel L sehingga belum dapat menyentuh bandar pil dobel L yang menyuplai obat keras pil dobel L

SARAN

1. Memberikan dan menambah lagi sosialisasi mengenai apa sebenarnya obat ekstasi pil dobel L itu dan apa saja dampak berbahaya dari mengkonsumsi pil dobel L ini tanpa adanya resep dan pengawasan dari dokter kepada pengguna obat ekstasi pil dobel L.
2. Terhadap kepolisian Polres Batu untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di Polres Batu dalam penanganan perkara pengedaran obat ekstasi pil dobel L dan perlu membangun laboratorium untuk memudahkan proses pemeriksaan awal dalam mengetahui jenis obat yang dijadikan barangbukti saat penyidikan.

3. Memberikan pelatihan tertentu bagi pelaku pengedaran obat keras pil dobel L agar bisa mendapatkan penghasilan lain dari hal yang lebih baik dan memberikan penyuluhan kepada pengedar pil dobel L mengenai pemahaman akan bahaya mengedarkan obat ekstasi tanpa adanya izin edar dari pil dobel L yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 , Pasal 106, Pasal 196-197 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8 tentang Kesehatan

Undang – undang Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 9 – 11 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Undang – undang Pasal 362 KUHP tentang pencurian

Undang – undang Pasal 160 KUHP tentang penghasutan

Undang – undang Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan

Undang – undang Pasal 378 tentang penipuan

Undang – undang Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang

Buku

Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, Hlmn 2

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Hendra Widodo, 2013, *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker, cetakan pertama*, D-Medika, Yogyakarta.

Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, , 2007, *OBAT-OBATAN PENTING : Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, “The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College”, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>.

Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia : Fakultas Hukum. UNISSULA. Semarang. Hlmn : 204

Ridwan M. Thaha, 2016, *Penyalahgunaan Obat keras Oleh Buruh Bangunan di Kota Makasar*, jurnal vol-2FKKM.